

Abstract

This study is about the politics of truth, more specifically about the contestation of the truth regime that frames the process of transferring power in the name of a partnership in the interior of East Kalimantan. In this context, politics takes place at the level of contestation of meaning, not just the contestation of interests between actors. It is at this level that this study wishes to contribute. Whereas with the ongoing contestation of meanings that take place in each regime of truth, a circularity process occurs. This is formulated from the workings of the truth regime that takes place in large-scale land acquisition (the Million Hectare Palm Oil Program), a discursive field in which the Weberian and Marxian versions of the truth are at stake.

This study takes place in the context of the truth between the views of adherents of Max Weber (Weberian) on the one hand, and followers of the way of thinking of Karl Marx (Marxian) on the other. This study shows a critical debate on understanding land accumulation between the Weberian perspective (internal territorialization) and the Marxian perspective (primitive accumulation and accumulation by disposition), and recently the concepts of power of exclusion and adverse incorporation have emerged but share the metaphor of a sovereign subject that treats power. as structures or commodities. To break the controversy of the ongoing truth regime contestation, this study borrows the analytical strategy offered by Foucault which is conveyed metaphorically: "to cut off the king's head", chopping off each other's theoretical reasoning. The process of "cutting off the king's head" in theorizing to understand land acquisition takes place in an arena that Foucault calls governmentality.

To simulate this, the reasoning of the Modang people is actualized in the interior of East Kalimantan. This study shows that they have their way of thinking and their regime of truth. They do face false truths, having to accept the fact that partnerships are just a discursive trick to justify land tenure. What is clear, from this study, is an understanding of the distinctive concept of power: (1) underestimating and denying the creativity and critical power of agents to act, negotiate, struggle and create their meaning; (2) creating a dichotomy or binary in understanding the operation of power, (3) placing power and resistance in an antagonistic way.

Working with the theories of governmentality, spatial production, and translational politics and guided by an ethnographic methodology, this study explains that the process of land accumulation takes place through the process of playing truth instead of ideology. In this truth regime, the

partnership is used as a technology of power to direct behavior (conduct of conduct). Within this framework, the partnership operates in three distinct but interrelated stages: (1) problematization of marginal land and problematization of marginal land and destructive swiddening practices, (2) technicalization of contracts, and (3) formation of pseudo farmers subject (subjectivation) instead of entrepreneur smallholders, (4) but the subject is not a submissive body that is easy to form and control.

The partnership analysis shows the limitations of the binary and repressive concept of power explaining large-scale land acquisitions. The partnership is not only a touching story about empowering small communities (Weberian discourse) or the suspicion of the operation of "invisible hands" (Marxian discourse) but also about the implementation of biopower for capital accumulation.

To overcome the problem of agency and power binary in explaining land accumulation, this study offers a circular analysis framework. It is through this circular truth that "to cut off the king's head" in theorizing. The basic proposition is that when we circulate, we traverse space and time by engaging body and power at the same time.

Keywords: Regime of truth, circulation, governmentality, biopower, partnership, production of space, and political translation.

Abstrak

Studi ini adalah tentang politik kebenaran, lebih spesifiknya tentang kontestasi regime kebenaran yang membingkai proses alih kuasa atas nama kemitraan di pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam konteks ini, politik berlangsung pada tataran kontestasi makna, bukan sekadar kontestasi kepentingan antar aktor. Pada level inilah studi ini ingin berkontribusi. Bahwa dengan berlangsungnya kontestasi makna yang terus-menerus berlangsung dalam masing-masing regime kebenaran, terjadilah proses yang bersifat sirkularistik. Hal ini dirumuskan dari bekerjanya regime kebenaran yang berlangsung dalam akuisisi lahan berskala luas (Program Sawit Sejuta Hektare), bidang diskursif dimana Weberian dan Marxian mempertaruhkan versi kebenarannya masing-masing.

Studi ini berlangsung dalam konteks kebenaran antara cara pandang penganut paham Max Weber (Weberian) di satu sisi, dan kaum pengikut cara berpikir Karl Marx (Marxian) di sisi lain. Studi ini memperlihatkan perdebatan kritis memahami akumulasi lahan antara perspektif Weberian (teritorialisasi internal) dengan perspektif Marxian (akumulasi primitif dan *accumulation by dispossession*), dan akhir-akhir ini muncul konsep *power of exclusion* dan *adverse incorporation* namun pada dasarnya berbagi metafora subjek berdaulat yang memperlakukan kuasa sebagai struktur atau komoditas. Untuk memutus kontroversi dari kontestasi regime kebenaran yang berlangsung, studi ini meminjam strategi analisis yang ditawarkan Foucault yang disampaikan secara metaforik: “memenggal kepala raja”, memenggal nalar teoritik masing-masing. Proses “memenggal kepala raja” dalam berteori untuk memahami akuisisi lahan berlangsung dalam arena yang disebut Foucault sebagai *governmentality*.

Untuk mensimulasikan hal itulah, nalar Orang Modang diaktualisasikan di Pedalaman Kalimantan Timur. Studi ini memperlihatkan bahwa mereka punya jalan pikiran, regime kebenarannya sendiri. Mereka memang menghadapi kebenaran semu, harus menerima kenyataan bahwa kemitraan hanyalah kiat diskursif untuk menjustifikasi penguasaan lahan. Yang jelas, dari telaah ini, terkuak pemahaman konsep kuasa yang khas: (1) meremehkan dan menafikan kreativitas dan daya kritis agen untuk bertindak, bernegosiasi, berjuang dan menciptakan maknanya sendiri; (2) mencipta dikotomi atau bineritas dalam memahami operasi kuasa, (3) menempatkan kuasa dan perlawanan secara antagonis.

Bekerja dengan teori *governmentality*, produksi ruang, dan politik translasi dan dipandu oleh metodologi etnografi, studi ini menjelaskan bahwa proses akumulasi lahan berlangsung melalui proses permainan kebenaran alih-alih ideologi. Dalam regime kebenaran ini, kemitraan digunakan sebagai teknologi kuasa untuk mengarahkan perilaku (*conduct of conduct*). Dalam

bingkai ini, kemitraan beroperasi pada tiga tahapan berbeda namun saling terkait: (1) *problematisasi* tanah marginal dan kemiskinan petani ladang, (2) *teknikalisasi* kontrak, dan (3) *pembentukan subjek (subjektivasi)* petani virtual (semu) alih-alih petani wirausaha, (4) namun subjek bukanlah tubuh patuh yang mudah dibentuk dan dikontrol.

Analisis kemitraan menunjukkan keterbatasan konsep kuasa biner dan represif menjelaskan akuisisi lahan berskala luas. Kemitraan bukan hanya cerita mengharukan tentang pemberdayaan masyarakat kecil (wacana Weberian) atau dicurigai beroperasinya “tangan-tangan tak tampak” (wacana Marxian) namun tentang pelaksanaan *biopower* untuk akumulasi kapital.

Untuk mengatasi masalah keagenan dan bineritas kuasa dalam menjelaskan akumulasi lahan, studi ini menawarkan kerangka analisis kebenaran sirkuler. Melalui kebenaran sirkuler inilah “kepala raja dapat dipenggal” dalam berteori. Proposisi dasarnya bahwa ketika bersirkulasi, kita melintasi ruang dan waktu dengan melibatkan tubuh dan energi (kuasa) sekaligus.

Kata Kunci: Regime kebenaran, sirkulasi, *governmentality*, *biopower*, kemitraan, produksi ruang, dan politik translasi.